

**PERSEPSI WARGA REMPOA TERHADAP PELAYANAN
DAN PROSEDUR POLISI**

**STUDI KASUS: BENTROK WARGA REMPOA DENGAN
FBR 31 JULI 2010**



T E S I S

OLEH:

PINTO JAYANEGARA

(0806447394)

**PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS INDONESIA
SALEMBA-PTIK
2010**

**PERSEPSI WARGA REMPOA TERHADAP PELAYANAN
DAN PROSEDUR POLISI
STUDI KASUS: BENTROK WARGA REMPOA DENGAN
FBR 31 JULI 2010**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

PINTO JAYANEGARA

0806447394



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
DESEMBER 2010**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PINTO JAYANEGARA

NPM : 0806447394

Jurusan : Kajian Ilmu Kepolisian

Menyatakan bahwa tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumber sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Indonesia, apabila terbukti melakukan tindakan plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Januari 2011



PINTO JAYANEGARA, BA, S.Psi.

NPM : 0806447394

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
N a m a : **PINTO JAYANEGARA**
N.P.M : **0806447394**
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**
Judul Tesis : **PERSEPSI WARGA REMPOA TERHADAP
PELAYANAN DAN PROSEDUR POLISI**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Sarlito Wirawan, Psi.
Penguji : Dr. dr. Hadiman, SH., MSc.
Penguji : Drs. Ahwil Lutan, SH., MBA., MM.
Penguji : Prof. Dr. Koesparmono Irsan, SH., MBA., MM.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Desember 2010

UCAPAN TERIMA KASIH

Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua ibu-bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu (QS Luqman [31]:14)

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas semua berkah, rahmat, karunia, petunjuk dan bimbingan-Nya juga terucap shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta atas dukungan doa dan moril dari kedua Orang tua. Tidak lupa keluarga peneliti yang senantiasa menyemangati peneliti dalam menyelesaikan tesis ini. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memnuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Sains dari Universitas Indonesia. Judul yang dipilih dalam Tesis ini adalah "Persepsi Warga Rempoa terhadap Pelayanan dan Prosedur Polisi."

Pada kesempatan ini peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Sarlito Wirawan Sarwono, selaku dosen pembimbing Tesis. Bapak Profesor Sarlito Wirawan Sarwono telah memberikan banyak waktu dan bantuan, serta memberikan pengetahuan dan arahan yang membangkitkan semangat peneliti demi terwujudnya skripsi ini.

Perjalanan panjang studi dan penelitian tesis ini tidak mungkin terlepas dari peran berbagai pihak yang telah banyak berjasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bpk. Irjen (P) Dr. dr. Hadiman, SH., MSc. sebagai dosen penguji I yang telah banyak memberikan bantuan, saran dan ilmu yang bermanfaat bagi penelliti.
2. Bpk. Komjen (P) Drs. Ahwil Lutan, SH, MBA., MM. selaku dosen penguji II yang telah memberikan saran dan ilmu yang berharga bagi peneliti.

3. Bpk. Irjen (P) Prof. Dr. Koesparmono Irsan, SH., MBA., MM. selaku dosen penguji III yang telah memberikan saran dan ilmu yang berharga bagi peneliti.
4. Seluruh Dosen KIK Universitas Indonesia.
5. Sekretariat KIK.
6. Warga Rempoa yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam melakukan penelitian ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa KIK Universitas Indonesia.
8. Individu-individu lain yang tidak dapat disebutkan secara satu persatu, yang telah membalas jasa kebaikan dan kemurahan kalian.

....Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik (QS At-Taubah [19]: 120).

Pada akhir kata peneliti berharap semoga karya tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 11 Januari 2011

Penulis,


Pinto Jayanegara, BA, S.Psi.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pinto Jayanegara

NPM : 0806447394

Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian

Fakultas : Pascasarjana

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty – Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Persepsi Warga Rempoa terhadap Pelayanan dan Prosedur Polisi.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 11 Januari 2011

Yang Menyatakan,



(PINTO JAYANEGARA)

ABSTRAK

PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS INDONESIA

TESIS, 11 JANUARI 2011

- A. Nama / NPM : Pinto Jayanegara (0806447394)
- B. Judul : Persepsi Warga Rempoa terhadap Pelayanan dan Prosedur Polisi
- C. Halaman : xx + 73 Halaman + Lampiran
- D. Isi Abstrak :

Filosofi *Community policing* dirasakan telah merubah bentuk dasar dari pemolisian di masyarakat modern dengan cara mengganti polisi sebagai pengatur masyarakat menjadi polisi sebagai pendukung dari masyarakat. Dengan lebih mendekatkan diri ke masyarakat dan lebih melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan, melahirkan suatu bentuk pengendalian dan pencegahan kriminal secara aktif. Demi mencapai hal tersebut, petugas kepolisian hendaknya perlu lebih mengenal, beradaptasi dan membangun kepercayaan (*trust-building*) dengan masyarakat di wilayahnya. Tidak kalah penting perlu dirasakan perlunya merangkul masyarakat sebagai mitra (*strategic partner*) demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat polisi, prosedur polisi, dan rasa aman masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelayanan dan prosedur polisi terhadap rasa aman masyarakat, khususnya warga Rempoa pada saat terjadinya bentrok dengan Ormas FBR pada 31 Juli 2010. Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian penjelasan (*explanatory research*), karena penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Unit analisis penelitian ini adalah warga masyarakat Rempoa, Ciputat, Jakarta Selatan. Responden penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang ada dan turut serta dalam bentrok dengan Ormas FBR pada bulan Juli 2010. Penelitian ini akan menggambarkan persepsi warga masyarakat mengenai pelayanan dan prosedur polisi pada saat itu dalam proses pengamanan lingkungan warga. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh positif *pelayanan polisi terhadap rasa keamanan lingkungan*, artinya pelayanan polisi yang dirasakan responden tidak menciptakan perasaan keamanan lingkungan. Namun untuk prosedur polisi terdapat pengaruh positif *prosedur polisi terhadap rasa keamanan lingkungan*, artinya prosedur polisi yang dirasakan responden mempengaruhi perasaan keamanan lingkungan.

- E. Kepustakaan : 21 Buku + 2 Peraturan Perundang – Undangan + 22 Jurnal + 7 Situs Internet

ABSTRACT

POLICE SCIENCE STUDIES UNIVERSITY OF INDONESIA

THESIS, 11 JANUARY 2011

- A. Name/ NPM : Pinto Jayanegara (0806447394)
- B. Title : Rempoa Citizens Perception of Police Services and Procedures
- C. Pages : xx + 73 Halaman + Lampiran
- D. Contents :

The philosophy of Community Policing has changed the basic form of policing in modern society by replacing the role of police as regulator of society into the police as supporter of the community. By becoming closer to the community and more community involvement in maintaining security, a form of control and crime prevention can be done pro-actively. To achieve this, police officers should at least be more familiar with, adapt and build trust (trust-building) with communities in its territory. No less important is the need to embrace the community as partners (strategic partner) in order to improve the quality of service, police procedures, and sense of security in the community. This study aims to examine the effect of police services and police procedures towards the sense of security in community, specifically in residents of Rempoa, Jakarta. This study examines the clash which happens in Rempoa between local residents and group from outside the community (Forum Betawi Rempug/FBR) on July 31, 2010. This study includes the method of explanatory research and intend to explain the causal relationship between variables by testing the hypothesis. The unit of analysis of this study are citizens of Rempoa, Jakarta. The Respondents of this research was focused on existing members of community which participate in the clash. This study will describe the perceptions of citizens regarding services and procedures of the police at that time, in the process of securing the neighborhood. Based on the results of research and discussion, it may be concluded that there was no positive effect on sense of security police services, meaning that respondents perceived the police service does not create a sense of neighborhood security. However, for police procedures there is a positive effect on police procedures for sense of neighborhood security.

Keywords : *Fear of crime, Community policing, Police*

DAFTAR ISI

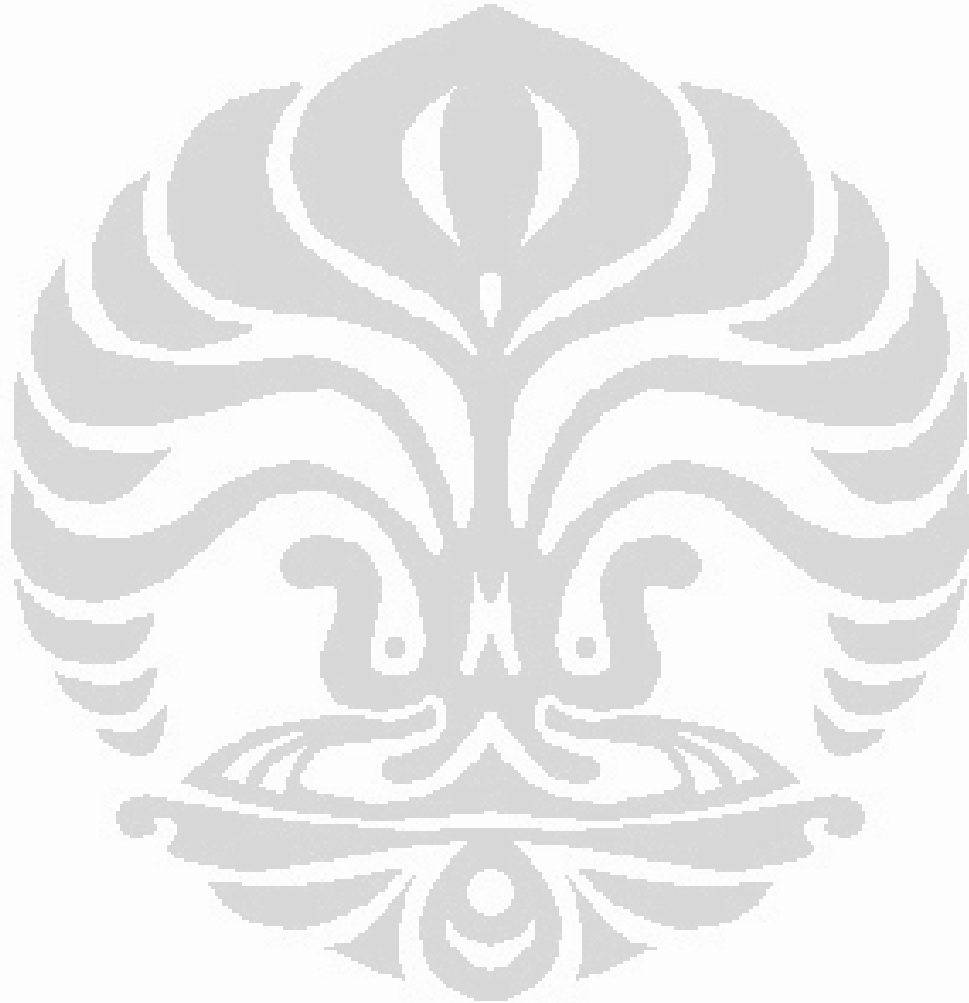
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	7
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4. Tujuan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
BAB DUA TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Kerangka Konsep.....	10
2.1.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Polri.....	15
2.1.2 Dua Sisi dari Fungsi dan Tugas Polisi.....	15
2.1.3 Polisi Sebagai Penegak Hukum.....	17
2.1.4 Polisi Sebagai Pengayom.....	18
2.1.5 Kerjasama Polri dengan Masyarakat (<i>Community Policing</i>).....	20
2.1.6 Prosedur dan Pelayanan Kepolisian.....	24
2.1.7 Pemolisian Komunitas.....	26
2.2. Kerangka Teori.....	34
2.2.1. Tujuan Utama Pemolisian Komuniti.....	34
2.2.2 Kerjasama Masyarakat.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Indeks Pelayanan Polisi	54
Tabel 3.2 Indeks Prosedur Polisi	55
Tabel 3.3 Indeks Keamanan Lingkungan	56
Tabel 3.4 Pengujian Validitas untuk Indeks Pelayanan Polisi	59
Tabel 3.5 Pengujian Validitas untuk Indeks Prosedur Polisi	61
Tabel 3.6 Pengujian Validitas untuk Indeks Keamanan Lingkungan	62
Tabel 3.7 Hasil Pengujian Reliabilitas	64
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	66
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	67
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	68
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama tinggal	69
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Dirumah saat bentrok	70
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Ikut serta dalam bentrok	70
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Apakah anggota ormas	71
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	72
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Variabel Indeks Pelayanan Polisi	72
Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Variabel Prosedur Polisi	74
Tabel 4.11 Statistik Deskriptif Variabel Keamanan Lingkungan	75
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesa 1	77
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Hipotesa 2	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir	49
-----------------------------	----

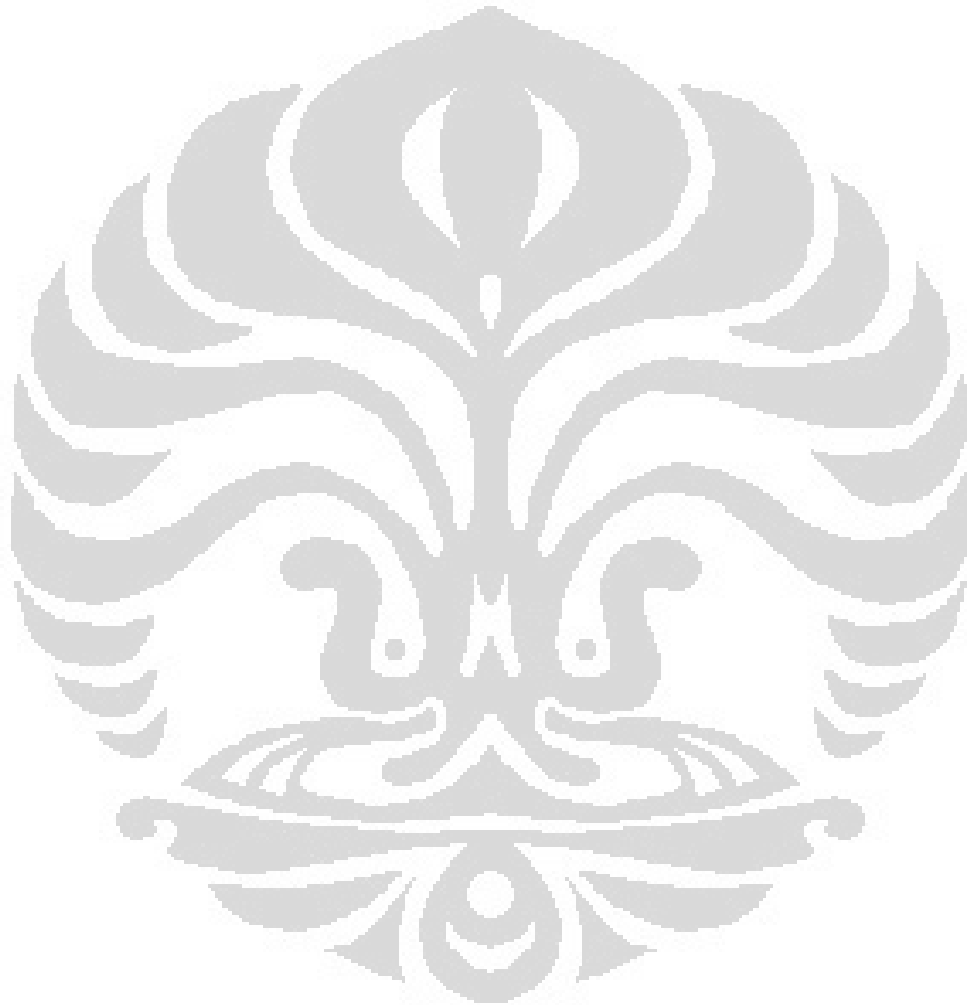


DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Responden Penelitian

Lampiran Validitas dan Reliabilitas

Lampiran Uji Hipotesis



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum kondisi keamanan dan ketertiban harus kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Berbagai tindak kejahatan dapat ditanggulangi berkat kesigapan aparat keamanan dalam mendeteksi dan mengatasi gejala awal gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Langkah pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat telah meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungannya. Namun, belum tuntasnya penanganan krisis perekonomian yang melanda negara Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 berimplikasi pada masih tingginya tingkat kesenjangan kesejahteraan sosial, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Ketidacukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan didorong oleh faktor perbedaan pemahaman terhadap keanekaragaman budaya, kepadatan penduduk, serta kelemahan iman seseorang dapat mendorong keinginan untuk melakukan tindak kejahatan. Di samping itu, masih lemahnya sistem penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai dampak masih rendahnya profesionalitas aparat kepolisian, menyebabkan penindakan dan penyelesaian kasus-kasus kriminalitas tidak dapat berjalan secara optimal.

Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu Ormas yang ada di wilayah Jakarta adalah Forum Betawi Rempug.

Menurut pemberitaan berbagai media massa, Forum Betawi Rempug (FBR) adalah sebuah organisasi kemasyarakatan betawi yang mengundang berbagai kontroversi. FBR mulai jadi sorotan sejak kelompok ini menyerang anggota UPC (Urban Poor Consortium/Konsorsium Rakyat Miskin Kota) di halaman kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada 2002. Saat itu anggota UPC meminta Komnas HAM mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan aksi penggusuran terhadap masyarakat miskin kota. Tiba-tiba anggota FBR muncul dan menyerang rombongan UPC. Akibatnya, tiga orang mengalami luka-luka (<http://forum.detik.com/fbr-pahlawan-sosial-atau-preman-sosial-sih-t28183p2.html>, diakses tanggal 1 Oktober 2010 pukul 08.45 WIB).

Anggota FBR juga sering dimintai bantuan menjaga tanah yang bersengketa. Sesekali mereka harus berhadapan dengan petugas penggusuran. Satu contohnya ketika eksekusi tanah di kompleks Billy & Moon, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ratusan orang FBR dan Forum Komunikasi Anak Betawi mesti berhadapan dengan 300 petugas Ketenteraman dan Ketertiban Pemerintah Kota Jakarta Timur. Peristiwa itu mengakibatkan dua petugas terluka di bagian kepala. Polisi akhirnya menangkap belasan anggota FBR dengan barang bukti golok, pisau, samurai, dan palu besar.

(<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2006/06/19/NAS/mbm.20060619.NA.S120844.id.html>, diakses tanggal 2 Oktober 2010 jam pukul 12.45 WIB).

Sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru dan melemahnya peran TNI dan polisi, organisasi masyarakat serupa FBR tumbuh subur di berbagai daerah, antara

karena semestinya polisi sudah bisa mempersiapkan pengamanan lebih dini. Karena potensi bentrok sudah dirasakan oleh warga sejak siang hari. Narasumber yang merupakan warga Rempoa merasakan kurangnya komunikasi antara polisi-warga. Dari kasus bentrok tersebut, peranan polisi untuk menjaga keteraturan dan ketertiban di daerah ini sangat utama. Namun, mereka hanya akan berhasil, bilamana polisi dapat membuka jalur komunikasi yang efektif dan kerjasama yang baik dengan masyarakat di wilayahnya.

Salah satu konsep kerjasama pengamanan antara polisi dan masyarakat adalah *community policing* atau pemolisian komunitas. *Community policing* didefinisikan sebagai suatu pendekatan manajemen dan filosofi organisasi yang bertujuan meningkatkan hubungan antara masyarakat dengan polisi, secara proaktif memberikan solusi dan pelayanan terhadap masyarakat terhadap penanganan kejahatan dan masalah kejahatan lainnya (Dietz, 1997).

Community policing timbul sebagai paradigma penegak hukum yang profesional di negara-negara maju yang demokratis. Kegiatannya menekankan pada penghapusan dari konsep tradisional pada bentuk perintah dan pengendalian dari polisi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsep tersebut mewakili suatu filosofi baru dalam pemolisian yang melihat partisipasi dan dukungan anggota masyarakat dengan polisi, bekerjasama sebagai partner untuk menjaga keteraturan dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat secara aktif membantu polisi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Idealnya timbul hubungan kerjasama, komunikasi dan kepercayaan (*trust*) yang baik antara polisi dan masyarakat (Dietz, 1997).

pencegahan kriminal secara aktif, dan secara utama mengubah dasar dari pemolisian polisi yang memiliki kekuatan menjadi polisi yang melayani. Di dalam mencapai tujuan – tujuan tersebut, petugas dari polisi itu sendiri perlu beradaptasi dengan lingkungannya di dalam masyarakat, dengan membangun hubungan kepercayaan di dalam anggota masyarakat, menjaga hubungan baik dan kerjasama dengan penduduk setempat, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk membentuk jaringan yang luas dengan masyarakat dalam memecahkan masalah kriminal, *fear of crime* dan ketidakteraturan (Dietz, 1997).

1.2 Permasalahan

Biaya untuk kegiatan pelayanan pengamanan dan keamanan memang tidak murah, apalagi biaya pengamanan dan keamanan yang diselenggarakan oleh polisi. Karena biaya tersebut mencakup berbagai biaya yang bukan hanya untuk biaya operasional pengamanan dan keamanan tetapi juga mencakup berbagai pembiayaan yang harus dikeluarkan untuk administrasi atau manajemen kepolisian dan berbagai sarana dan prasarana kepolisian. Tetapi biaya yang besar untuk keamanan tersebut dibandingkan dengan kerugian yang harus diderita oleh korban kejahatan akan masih jauh lebih murah.

Begitupun di kota – kota besar, berbagai golongan suku bangsa dengan hukum adat yang berbeda – beda mereka hidup berdekatan, dengan diwarnai berbagai aspirasi dan tingkah laku yang dapat bertentangan. Dalam konteks yang sedemikian rupa itu, polisi dibebani tugas harus dapat memelihara ketertiban. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, polisi perlu memperhatikan hukum adat yang dianut oleh masyarakat dimana mereka bertugas dan perlu tanggap terhadap

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti lain : Sebagai acuan dan masukan yang bermanfaat dalam penelitian selanjutnya di bidang yang sama.
2. Bagi Polri : Memberikan masukan informasi yang bermanfaat dalam memahami keadaan masyarakat yang membutuhkan keamanan di lingkungannya dengan pola pendekatan *community policing*



dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; (b) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan; (c) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; (d) turut serta dalam pembinaan hukum nasional; (e) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; (f) melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; (g) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya; (h) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; (i) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; (j) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; (k) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; (l) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk: (a) menerima laporan dan/atau pengaduan; (b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; (c) mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat; (d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan

kepolisian internasional; (k) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian diberikan wewenang, yaitu: (a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; (b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; (c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; (d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; (e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; (f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; (g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; (h) mengadakan penghentian penyidikan; (i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; (j) mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana; (k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; (l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ketentuan terkait “tindakan lain” tersebut menyatakan: (a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; (e) menghormati hak asasi manusia.

2.1.1 Pandangan Masyarakat Terhadap Polri

Polri (Kepolisian Republik Indonesia) sebagai pengayom masyarakat dalam bidang pertahanan dan keamanan, keberadaannya masih dirasakan jauh dalam konsep hubungannya dengan masyarakat. Polri belum bisa menjembatani kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya secara konseptual. Pemisahan antara institusi Polri dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang dimulai pada tanggal 1 April 1999 diharapkan dapat meningkatkan wibawa Polri dimata masyarakat. Pemisahan tersebut juga mengundang berbagai harapan terhadap peningkatan profesionalisme dan kemandirian Polri dari mempersempit penggunaan kekerasan oleh Kepolisian akibat posisi dan perilaku Kemiliteran (ABRI) (Djamin, 2007).

2.1.2 Dua Sisi dari Fungsi dan Tugas Polisi

Penegakan hukum yang umumnya diharapkan oleh masyarakat sebagai fungsi polisi, adalah penegakan hukum pidana (*enforcing the criminal law*). Sebagai alat perlengkapan negara (aparatur negara) polisi bertanggungjawab melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah sehari-hari yaitu menimbulkan rasa aman pada warga masyarakat. Tugas pemerintah ini dilakukan polisi melalui penegakan hukum pidana, khususnya melalui pencegahan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang terjadi. Tetapi dalam usaha menimbulkan rasa aman ini, polisi juga bertugas memelihara ketertiban atau keteraturan (*maintaining order*).

Sebagaimana telah disebut di atas, masyarakat menginginkan bahwa polisi menegakkan hukum pidana dengan mencegah warga menjadi korban kejahatan dan walaupun warga ada yang menjadi korban, polisi harus mengungkapkan korban tersebut dan menangkap pelakunya. Terutama terhadap kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan serius (*violent and serious crimes*) terdapat desakan masyarakat yang kuat agar polisi melakukan tugasnya dengan cepat.

Namun dalam usaha penegakan hukum ini, tugas polisi tidak saja menyangkut kejahatan serius dengan kekerasan. Polisi juga diwajibkan menegakkan hukum dalam kejahatan-kejahatan yang ringan sifatnya. Dan lebih luas lagi, polisi juga diminta menegakkan peraturan administratif (yang sering mempunyai sanksi pidana).

Polisi yang digambarkan di atas adalah sebagai "*law enforcer*" dan sebagai "*crime fighter*". Khususnya sebagai *crime fighter* terhadap *violent and serious crimes*, masyarakat mengharapkan polisi berperan sebagai *proactive crime fighter*. Dalam peran ini polisi harus mengambil inisiatif untuk mencegah para penjahat dan bukan baru bertindak apabila korban meminta bantuan (bersikap reaktif). Pekerjaan polisi dalam peristiwa-peristiwa seperti ini dapat diibaratkan "mempergunakan api untuk memadamkan kebakaran", karena polisi sering diharapkan memakai pula "kekerasan" (*force*) (Suparlan, 2008).

Wajah polisi disini memang sering "angker" (ditakuti oleh "orang jahat", yang adalah juga warga masyarakat). Gambaran umum masyarakat bahwa polisi harus ditakuti terlihat pula dalam hal seorang ibu mengancam anaknya yang nakal untuk dipanggilkan "pak polisi" (Suparlan, 2008).

Dalam pemahaman seperti ini maka fungsi polisi adalah "mengatasi situasi" (*handling the situation*). Di sini pula peranan polisi dalam memecahkan masalah dilakukan baik dengan "menegakkan hukum", maupun dengan cara lain : sekedar ancaman dan paksaan (tanpa menggunakan kekerasan) ataupun dengan menunjukkan simpati dan pengertian (tidak saja pada korban, tetapi juga pada pelaku). Istilah polisi yang berperan sebagai "*watchmen*" (dan bukan "*crime fighter*") dan polisi yang berperan sebagai "*community problem solver*" adalah dalam kaitannya dengan fungsinya dapat mengatasi setiap situasi yang memerlukan bantuannya (sebagai pengayom) (Suparlan, 2008).

Dalam fungsinya sebagai pengayom yang memelihara keteraturan, maka sering pula polisi melaksanakan peranan tambahan (*additional role*). Dikatakan peranan tambahan karena sebenarnya ada instansi publik lain yang juga membantu dan melayani masyarakat memelihara keteraturan. Peranan polisi yang lain adalah menciptakan lingkungan yang aman (yang juga merupakan tugas pamongpraja dari Ketua RT sampai Kepala Kelurahan), mengatur kelancaran lalu lintas di jalan raya (di samping dinas lalu lintas jalan raya), menyalurkan permasalahan kenakalan remaja (yang seharusnya ditangani pula oleh dinas sosial), menyelesaikan konflik dalam keluarga atau antar-tetangga (pertama-tama tugas Ketua RT dan RW), mengatur ketertiban sipil (*civil order*) dalam kerumunan umum (pawai, pemogokan buruh, demonstrasi damai) dan kadang-kadang pula membantu warga dalam keadaan darurat (kecelakaan, sakit dan kematian).

Sementara itu, Trojanowicz, Robert C and Susan Trojanowicz (1986) merumuskan CP sebagai berikut:

metode pemolisian apapun yang mencakup penugasan seorang polisi ke wilayah yang sama, bertemu dan bekerja bersama dengan penduduk setempat dan pengusaha yang tinggal dan bekerja di wilayah tersebut. Warga dan polisi bekerjasama untuk mengidentifikasi masalah – masalah di wilayah tersebut dan secara bersama – sama menyelesaikannya. Petugas polisi berfungsi sebagai katalisator, yang menggerakkan masyarakat dan komunitas ketetangaan dalam memecahkan masalah – masalah mereka sendiri, serta mendorong warga untuk saling menolong dan membantu satu sama lain.

Robert Trojanowicz (1983) mendefinisikan *community policing* sebagai berikut:

Suatu falsafah mengenai jasa polisi yang bersifat purnalayan dan mempribadi, dimana seorang polisi melakukan patroli dan bekerja di wilayah yang sama secara permanen, dari tempat yang terdesentralisasi, yang bekerja berdasarkan kemitraan proaktif dengan penduduk setempat untuk mengenali dan memecahkan masalah bersama – sama.

Bersama Carter, Trojanowicz mendefinisikannya sebagai berikut :

Community Policing didefinisikan sebagai suatu falsafah dan bukan suatu taktik khusus, suatu pendekatan yang bersifat proaktif dan terdesentralisasi, yang dirancang untuk mengurangi kejahatan, ketidaktertiban, serta ketakutan akan kejahatan, dengan melibatkan petugas yang sama di masyarakat tertentu selama jangka waktu yang lama.

Definisi Dinas Kepolisian Cornersville, AS :

terjadi tuntutan-tuntutan spesifik terhadap pelayanan pemolisian yang berbeda dari satu tempat ke tempat lain.

Pemolisian komunitas (*community policing*) dapat dilihat sebagai ujung tombak polisi (Polri), karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum (*public*) dimana dia bertugas. Dalam tugas pemolisian komunitas dia membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat, melalui berbagai kegiatan interaksi sosial dengan warga yang dilakukan secara berkala dan tetap serta berbagai intervensi sosial dalam kehidupan komunitas setempat. Penerapan program pemolisian komunitas oleh Polri yang akan dan sedang dilakukan di Indonesia menuntut persyaratan pengetahuan yang cukup mengenai teknik-teknik komunikasi, struktur sosial dan kebudayaan yang dimiliki oleh komunitas bersangkutan yang menjadi tempatnya bertugas, dan corak masyarakat Indonesia yang majemuk, serta corak masyarakat dan kebudayaan perkotaan dan pedesaan. Dengan pengetahuan yang memadai seperti tersebut diatas, petugas polisi masih harus mempunyai keterampilan profesional sebagai polisi dalam menangani tindak kejahatan, menengahi keonaran atau perkelahian, dan amuk massa, sehingga dia akan dapat bertindak secara profesional sebagai petugas pemolisian komunitas.

Pemolisian komunitas sebagai sebuah ideologi dan program pemolisian berbeda dari pemolisian yang berlaku secara tradisional. Dalam pemolisian tradisional, secara ideologi dan program-program pemoliannya adalah memerangi dan memberantas kejahatan yang ada dalam masyarakat dan upaya-upaya

pegawalan adalah proses pemberian pelayanan pengawalan kepada masyarakat, dimana di dalam proses pemberian pelayanan tersebut terlibat unsur-unsur petugas yang memberikan pelayanan.

Tugas-tugas kepolisian yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat antara lain meliputi: 1) Pelayanan atas pengaduan / laporan dari masyarakat. 2) Pelayanan dalam memberikan bantuan kepolisian. 3) Pelayanan administrasi lintas. 4) Pelayanan dalam proses penegakan hukum / penyidikan.

Tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kepolisian, antara lain: 1) Kompetensi dari pengembangan profesi. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan petugas-petugas Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan ketrampilan sesuai ketentuan hukum. 2) Konsistensi, baik dalam pengertian waktu dan tempat maupun orang. Artinya layanan Kepolisian harus disajikan secara konsisten pada sepanjang waktu, disemua tempat dan oleh segenap petugas. 3) Kualitas pelayanan Polri adalah keberadaan yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosial suatu masyarakat.

Menurut Undang-Undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa : " Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan Polri dalam Pasal 4 dijelaskan: Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan

- (1) Menangkal dan memerangi tindakan-tindakan pelanggaran hukum atau kejahatan, baik kejahatan dengan dan tanpa kekerasan, terorisme, penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba, *illegal logging*, kejahatan kerah putih yang mencakup korupsi dan kolusi, pencucian uang, pencurian hak paten, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya.
- (2) Mendorong terciptanya dan menciptakan keteraturan dan ketertiban sosial, melalui tindakan-tindakan pemolisian dalam menangani demonstrasi, tawuran antar-pelajar sekolah dan antar-mahasiswa, perkelahian antar-kampung, konflik atau perang yang dilakukan oleh gerakan separatis, konflik antar-sukubangsa, dan konflik antar-keyakinan keagamaan, dan berbagai bentuk konflik sosial lainnya.
- (3) Administrasi pengaturan kendaraan bermotor dan lalu lintas, serta penanganan berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas.
- (4) Penanganan perjudian dan pengelolaan pasca pelarangan perjudian, pelacuran, dan berbagai kegiatan dukungan terhadap satuan petugas trantib di daerah perkotaan dalam melakukan penanganan masalah-masalah sosial, seperti penggusuran PKL, pemberantasan miras, dan sebagainya.
- (5) Pengidentifikasian dan penanganan pelanggaran hukum, dan memproses pelanggaran tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk dibawa ke pengadilan.

Kegiatan pemolisian seperti tersebut di atas biasanya dilakukan dengan menunjukkan kekuatan polisi sebagai penegak hukum, dapat menggunakan kekerasan dan juga dapat dilakukan tanpa kekerasan. Antara polisi dengan sasaran kegiatan polisi jelas batas-batas sosialnya, yaitu polisi yang berada di pihak

kejahatan dalam komunitas dibantu oleh warga komunitas yang bersangkutan dan dengan dukungan pimpinan dan satuan yang memberinya tugas.

Landasan dari program pemolisian komunitas adalah membangun hubungan baik dengan warga komunitas, melalui hubungan timbal balik yang saling menghormati, saling mempercayai, dan saling memberi dan menerima prestasi. Untuk itu maka petugas harus mampu untuk tidak menonjolkan dirinya sebagai polisi yang secara hukum mempunyai kekuatan untuk memaksakan kehendaknya kepada warga komunitas yang dipolisikan. Dia harus mampu menempatkan dirinya dalam hubungan sosial yang dinamik dengan warga komunitas, yaitu pada dasarnya adalah sejajar, tetapi dalam konteks-konteks kepentingan tertentu dapat secara sosial lebih tinggi atau lebih berkuasa dan dalam konteks-konteks kepentingan lainnya dapat lebih rendah atau mengikuti kehendak warga komunitas.

Program pemolisian yang mendasar adalah patroli jalan kaki (*foot patrol*) dalam lingkungan komunitas. Keberadaan petugas patroli akan secara langsung atau tidak langsung mencegah tindak kejahatan. Dalam penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, keberadaan patroli jalan kaki telah secara signifikan menurunkan tindak kejahatan (Klockars, 1999). Sing (2000) menyatakan bahwa *foot patrol* adalah reorientasi strategi patrol yang dulunya banyak menggunakan kendaraan bermotor menjadi *community oriented*. Hal tersebut menitikberatkan pada patroli jalan kaki (*foot patrol*) yang dapat meningkatkan tingkat kehadiran (*sense of presence*) dari polisi dan mencegah terjadinya kejahatan (*deter crimes*).

Agar pemolisian komunitas itu dapat berhasil dengan baik maka menurut Bayley (1988: 236-237, dan Goldstein 1990: 179) harus mengikuti empat persyaratan, yaitu:

Apa yang dikemukakan oleh Bayley tersebut di atas, terutama pada waktu berbicara mengenai profesionalisme, sebenarnya profesionalisme bukan hanya profesionalisme dalam tugas dan dalam keahlian tetapi juga dalam imbalan gaji atau pendapatan. Bila gaji atau pendapatan tidak atau kurang mencukupi dan tidak sesuai dengan tugas yang diemban serta dengan keahlian yang dipunyai maka tidak akan ada profesionalisme. Bila gaji tidak mencukupi maka kecenderungan umum yang terjadi adalah si petugas polisi akan mencari uang tambahan dengan menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang dipunyai dalam perannya sebagai polisi dalam komunitas, atau masyarakat, atau umum. Dalam pemahaman tersebut, jika polisi digaji cukup, maka dia akan sejahtera, karena dia sejahtera maka akan bekerja dengan baik.

Perkembangan sistem kepolisian Jepang merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang Kekaisaran Jepang. Dalam perkembangan sejarah Jepang tersebut, terutama pada masa pemerintahan Shogun di jaman Edo, fungsi-fungsi kepolisian diemban oleh para Samurai. Mereka membawahi badan-badan pemerintahan yang melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan kepolisian, sedangkan aktifitasnya dikendalikan oleh para pejabat yang ditugaskan pada kota atau Ibukota. Adapun istilah Koban telah digunakan sejak pemerintahan Shogun, yang ditempatkan pada setiap pintu gerbang kediaman para Shogun, yang berupa sebuah bangunan kecil yang digunakan sebagai kantor, dan tempat untuk melakukan penjagaan oleh para pengawal / kesatria atau Samurai. Di dalam bangunan tersebut para ksatria atau samurai berjaga bergantian untuk menjaga keamanan tempat tersebut. Penggunaan kembali istilah Koban pada tahun 1874 tersebut adalah atas saran beberapa tenaga ahli dari Prusia guna

antara 12 sampai dengan 16 petugas yang bekerja dalam 3 *shift*. Tujuan utama pembentukan NPP adalah (1) meningkatkan hubungan dengan masyarakat, (2) mencegah dan menekan kejahatan melalui kerjasama dan dukungan dari masyarakat, (3) menampilkan citra polisi yang lebih baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi (Singh, 2000).

Pembentukan Pospol-Pospol, sebagai wujud dari program pemolisian komunitas, dalam setiap wilayah administrasi Polsek di Polda Metro DKI yang tanpa dibekali dana anggaran dari Polri, dan yang karenanya harus bertumpu pada 'partisipasi masyarakat' adalah sama dengan menyuruh pimpinan dan petugas Pospol untuk melakukan tindakan tidak bermoral dan tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme polisi. Begitu juga kegiatan rutin Pospol dan para petugas Pospol yang tanpa anggaran Polri, akan mendorong pimpinan dan petugas Pospol untuk mencari dana melalui kebijakan "partisipasi masyarakat", yang juga bertentangan dengan prinsip profesionalisme polisi dan dengan kode moral. Karena itu, secara hipotesis, fungsi Pospol di wilayah Polda Metro dapat dikatakan gagal, sesuai dengan persyaratan bagi keberhasilan pelaksanaan pemolisian komunitas seperti tersebut di atas.

Pada periode Gubernur DKI Ali Sadikin (1966–1977) telah dibangun pos – pos polisi sebanyak 76 buah di Jakarta yang didalamnya terdapat alat – alat komunikasi telepon yang pada saat itu membantu kerja polisi. Di saat ini pos polisi yang masih bertahan hanya 2 buah, yaitu di depan Sarinah Thamrin dan Taman Suropati.

keberhasilan atau kegagalan program (Vinzant & Crothers, 1994). Tidak mengejutkan, kerjasama kolaboratif antara masyarakat dan polisi adalah salah satu premise utama dari Pemolisian komunitas untuk meningkatkan performa polisi (MacDonald, 2002). Melalui komunikasi dua arah, lembaga kepolisian memperoleh lebih banyak informasi mengenai kebutuhan masyarakat, dan mereka dapat menghasilkan respon yang sesuai dengan bekerja berdekatan dengan masyarakat (CPC, 1994). Meskipun agen polisi menggunakan berbagai taktik kerjasama, Bayley (1996) dan Roth et al. (2004) mengklasifikasikan taktik ke dalam dua kategori utama dengan sedikit perbedaan.

Menurut Bayley (1996), kategori kerjasama yang pertama adalah *konsultasi*. Hal ini merujuk pada menjelaskan dan memprioritaskan masalah daerah dengan mendekati para penduduk masyarakat. Polisi menerima informasi mengenai masalah masyarakat termasuk keluhan mengenai polisi itu sendiri, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk mendidik dan menginformasikan anggota masyarakat mengenai kriminalitas dan ketidakteraturan bersamaan sekaligus mengenai keberhasilan dan kegagalan lembaga kepolisian. Dalam proses ini, arus informasi dua arah membuat polisi dan penduduk menjadi pencipta keamanan masyarakat (Greene, 2000). Selain kontribusinya terhadap keamanan masyarakat, menerima umpan balik dari masyarakat dapat digunakan dalam pengukuran performa para petugas polisi, mengukur kualitas layanan polisi, dan membantu dalam evaluasi program lembaga kepolisian (McGarrel, Benitez, & Gutierrez, 2003).

Kategori kerjasama yang kedua adalah *mobilisasi*, yang merujuk pada partisipasi aktif dari anggota masyarakat dan organisasi dalam strategi-strategi

Dalam hal pembentukan kerjasama, Roth et al. menemukan bahwa “antara tahun 1995 dan 1998, pertumbuhan penggunaan delapan taktik kerjasama bersifat signifikan. Sebaliknya, antara tahun 1998 dan 2000 hanya persentase agensi yang melakukan akademi polisi penduduk dan proyek pencegahan kriminalitas dengan bisnislah yang terus berkembang secara perlahan” (p. 7). Studi lain yang meneliti perubahan dalam usaha kerjasama masyarakat antara tahun 1992 dan 2002 menemukan bahwa para pekerja sukarela pada agensi, patrol penduduk yang diorganisir oleh agensi, dan partisipasi dalam akademi polisi penduduk meningkat dengan signifikan dalam sepuluh tahun (Fridell & Wycof, 2004).

2.2.3 Pencegahan Kriminalitas

Pemolisian komunitas merujuk pada perubahan besar dalam peran polisi (Walker & Katz, 2005). Bukannya menekankan kontrol tindak kriminal, peran polisi di dalam filosofi Pemolisian komunitas menekankan kerjasama dengan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang paling diresahkan oleh masyarakat (Palmiotto, 2000). Pergeseran peran polisi ini berusaha untuk mencapai tujuan “pencegahan kriminalitas” dan bukanlah kontrol tindak kriminal (Riechers & Roberg, 1990).

Ide pusat dari prevensi kriminalitas Pemolisian komunitas berakar dari program dan studi pada tahun 1970an (Rosenbaum, 1986). Program-program seperti pengawasan daerah, patroli penduduk, peningkatan pencahayaan, dan pengerasan target adalah contoh-contoh awal, dan meliputi taktik yang masih dapat ditemukan dalam strategi-strategi pencegahan kriminalitas saat ini. “Prevensi, dalam banyak cara, adalah gerbang dari Pemolisian komunitas, seperti halnya

kepercayaan masyarakat didapat untuk kolaborasi dan memupuk perilaku mematuhi hukum pada para anggota masyarakat.

Sherman dan Eck (2006) mengevaluasi beberapa studi yang meneliti efek Pemolisian komunitas terhadap prevensi kriminalitas dalam empat cara utama tersebut. Mereka menyimpulkan bahwa program pengawasan secara konsisten tidak menunjukkan pengaruh terhadap kriminalitas. Selain itu, mereka mengukur pengaruh tiga program populer yang dimaksudkan untuk meningkatkan kontak antara polisi dan penduduk. Program pertama adalah *community gathering*, yang hanya efektif jika rapat tersebut fokus pada tindak kriminal yang spesifik dan masalah yang mendasarinya. Program kedua adalah *kontak pintu-ke-pintu*, yang mengungkapkan bukti yang cukup kuat akan prevensi tindak kriminal yang signifikan (h. 317). Program ketiga adalah petugas penjaga, yang dianggap efektif pada beberapa area dengan jenis masyarakat tertentu.

Seperti program pengawasan, efek dari informasi yang disalurkan dari polisi kepada penduduk menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap tindak kriminal dan korban kejahatan. Dari keempat cara utama di atas, legitimasi polisi memiliki pengaruh terbesar terhadap tindak kriminal dan korban kejahatan, konsisten dengan teori “keadilan prosedural”. Yaitu, jika penduduk yakin bahwa polisi mewakili otoritas legal yang sah, mereka cenderung bekerjasama dan mematuhi hukum (Tyler, 1990). “Penelitian yang konsisten menunjukkan bahwa alasan kunci mengapa orang dewasa mendukung polisi adalah bahwa mereka memandang polisi sebagai sesuatu yang sah” (Lyn, 2007, p. 206). Sebagai kata terakhir, Sherman dan Eck (2006) mencatat bahwa program apapun yang meningkatkan legitimasi polisi memiliki potensi untuk mencegah kriminalitas.

agensi tunggal tidak dapat merespon semua masalah yang berkaitan dengan kriminalitas karena terdapat banyak sekali macam penyebab, faktor, dan kaitannya (Kappeler & Gaines, 2005). Apabila demikian, dapatkah Pemolisian komunitas mempengaruhi angka kriminalitas?

Jawaban tunggal yang memuaskan mengenai pengaruh Pemolisian komunitas terhadap kriminalitas tidaklah tersedia karena studi-studi telah menunjukkan hasil-hasil yang tidak dapat disimpulkan (Cordner, 1988, GAO, 2003, 2005; Mastrofski, 2006; MacDonald, 2002; Sherman & Eck, 2006; Zhao & Thurman, 2004). Secara umum, Pemolisian komunitas tanpa fokus yang jelas terhadap masalah spesifik belum terbukti efektif dalam mencegah kriminalitas. Telah terbukti bahwa patroli berjalan kaki, petugas penjaga, milis, dan rapat masyarakat tidaklah mereduksi kriminalitas (Weisburg & Eck, 2004). Namun, strategi-strategi tersebut terbukti efektif dalam mereduksi ketakutan akan kriminalitas dan meningkatkan kepuasan penduduk akan layanan kepolisian (Braga & Weisburg, 2006). "Hanya kontak pintu-ke-pintu yang rutin dengan penduduk lah yang terbukti dapat mereduksi kriminalitas" (Mastrofski, 2006, p. 48).

Salah satu penjelasan yang mungkin diberikan untuk hasil yang bertentangan dalam studi-studi sebelumnya adalah mengenai isu-isu validitas seperti masalah definisi dan konstruk Pemolisian komunitas itu sendiri (Lurigio & Rosenbaum, 1986). Beberapa program dapat diidentifikasi sebagai Pemolisian komunitas meskipun pada nyatanya program tersebut tidak meliputi elemen-elemen inti filosofi Pemolisian komunitas (Greene & Mastrofski, 1988). Di Amerika Serikat, selama lebih dari sepuluh tahun, bertepatan dengan periode waktu yang sama ketika Pemolisian komunitas mulai banyak diadopsikan. Namun,

tugas para petugas patroli. Program ini diimplementasikan dalam 14 daerah percobaan. Pada awal program, ditentukan bahwa 14 daerah yang berbeda akan berperan sebagai area kontrol. Singkatnya, terdapat 28 daerah pemukiman dalam sampel studi. Namun, karena popularitas program, area kontrol juga diberikan layanan patroli jalan kaki, dan kelompok kontrol dalam studi ini menjadi masalah (Trojanowicz, 1983). Para peneliti melakukan wawancara dengan para penduduk dan petugas kepolisian, menganalisa perubahan dalam data tindak kriminal resmi, melakukan analisis konten media lokal, dan memonitor sejauh mana dan sifat para petugas patroli dengan mengambil sampel catatan harian, mingguan, dan bulanan.

Proyek COPE (Citizens Oriented Police Enforcement) diluncurkan pada tahun 1982, di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Fokus awal proyek tersebut adalah untuk mereduksi ketakutan akan kriminalitas dengan menggunakan patroli dan kunjungan rumah-ke-rumah untuk melakukan survey. Proyek itu lalu terlibat dalam kombinasi pemolisian berorientasi masalah dan Pemolisian komunitas (Cordner, 1988). Selama fase pertama, para petugas meningkatkan kontak dengan anggota masyarakat melalui patroli jalan kaki, survey rumah ke rumah, program sekolah, rapat masyarakat, dan program pengawasan pemukiman. Selama fase kedua dan terakhir, polisi fokus pada mengumpulkan informasi mengenai masalah spesifik area dan menyusun respon terhadap masalah-masalah tersebut. "COPE juga mulai tidak bergantung pada taktik tradisional, dan melibatkan bantuan agensi-agensi masyarakat dan swasta dalam usaha pemecahan masalah mereka" (Cordner, 1988, p. 137).

memberikan uang untuk mempekerjakan petugas baru; karenanya, hasil yang paling jelas dari pemberian ini adalah peningkatan jumlah petugas kepolisian.

Studi tersebut dirancang untuk menguji apakah terdapat perubahan dalam tingkat kriminalitas karena pemberian COPS tersebut. Zhao et al. (2002) menggunakan properti UCR dan data kriminalitas kekerasan dari tahun 1994 sampai 1999. Sumber data kedua adalah jumlah dana yang diberikan oleh COPS; jumlah dana distandarisasi dengan membagi jumlah total dollar dengan 100.000 penduduk. Sumber data ketiga adalah Data Sensus AS tahun 1990. Set data keempat mengumpulkan data pengangguran dari Statistik Biro Perburuhan. Variabel tingkat pengangguran dan sensus berperan sebagai variabel kontrol.

Studi-studi tingkat agregat menunjukkan sejauh mana implementasi Pemolisian komunitas dalam departemen. Namun, studi-studi tersebut gagal untuk menemukan hubungan signifikan antara Pemolisian komunitas dan kriminalitas (Beckman, 2006; MacDonald, 2002). Lebih penting lagi, mereka benar-benar mengabaikan departemen kecil dalam analisis mereka, dan membatasi generalisasi penemuan mereka untuk Amerika kota. Weisheit (1993) mengkarakterisasikan hal ini sebagai "etnosentrisme perkotaan".

Di Slovenia, penelitian mengenai opini masyarakat mengenai prosedur yang dilakukan polisi dalam *traffic stop encounter* dan kecelakaan lalu lintas mulai pada akhir tahun 90 an:

- Secara umum, masyarakat puas dengan kerja dari polisi (sekitar 50 persen dari masyarakat puas dan sekitar 15 persen tidak puas). Dipelajari juga bahwa perbaikan perlu dilakukan dalam tehnik komunikasi dari petugas polisi, yang terkadang dianggap agung dan cerdas (dideklarasikan oleh 10

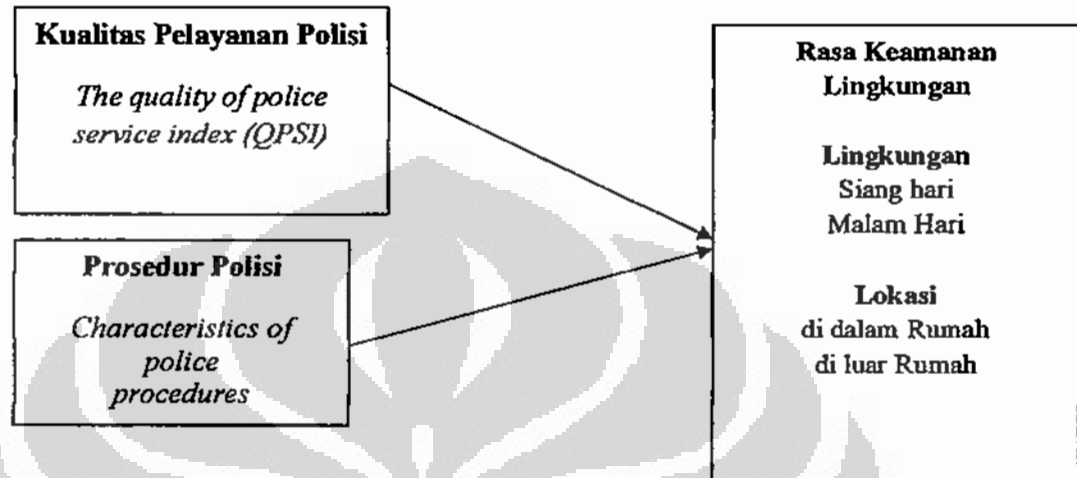
sosial dan kebudayaan yang dipunyai oleh komuniti bersangkutan yang menjadi tempatnya bertugas, dan corak masyarakat Indonesia yang majemuk, serta corak masyarakat dan kebudayaan perkotaan dan pedesaan. Dengan pengetahuan yang memadai seperti tersebut di atas, petugas polisi masih harus mempunyai keterampilan profesional sebagai polisi dalam menangani tindak kejahatan, menengahi keonaran atau perkelahian, dan amuk massa, sehingga dia akan dapat bertindak secara profesional sebagai petugas pemolisian komunitas (Suparlan, 2008).

Adanya harapan masyarakat yang terlampau banyak pada peran polisi sebenarnya menjadi modal utama bagi Polri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Membasmi segala bentuk kejahatan, menolong golongan lemah yang teraniaya, penegak hukum sekaligus pembimbing rakyat yang tampan simpatik. Polisi juga harus bersih dari cacat dan cela. Nantinya masyarakat akan berharap sosok polisi sebagai pelayan masyarakat yang simpatik, penegak hukum yang tegas tapi tetap luwes dan pemburu kejahatan yang tangguh.

Dalam konteks inilah sangat dibutuhkan profesionalisme Polri dalam menjalankan prosedur dan pelayanan terhadap masyarakat. Profesionalisme kepolisian mencakup suatu tindakan profesional bila tindakan itu dilandasi oleh keahlian tertentu yang diperoleh dari pendidikan khusus dan dilaksanakan dengan memenuhi kode etik profesi.

Banyak hal yang menjadi kendala aparat kepolisian belum profesional. Pertama, penguasaan teknis di lapangan yang diperlihatkan Polri yang belum memadai. Sebagai contoh, penanganan aksi unjuk rasa di Jakarta yang dalam beberapa kejadian lebih menonjolkan tindakan represif. Seharusnya hal tersebut

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



2.5 Hipotesis Penelitian

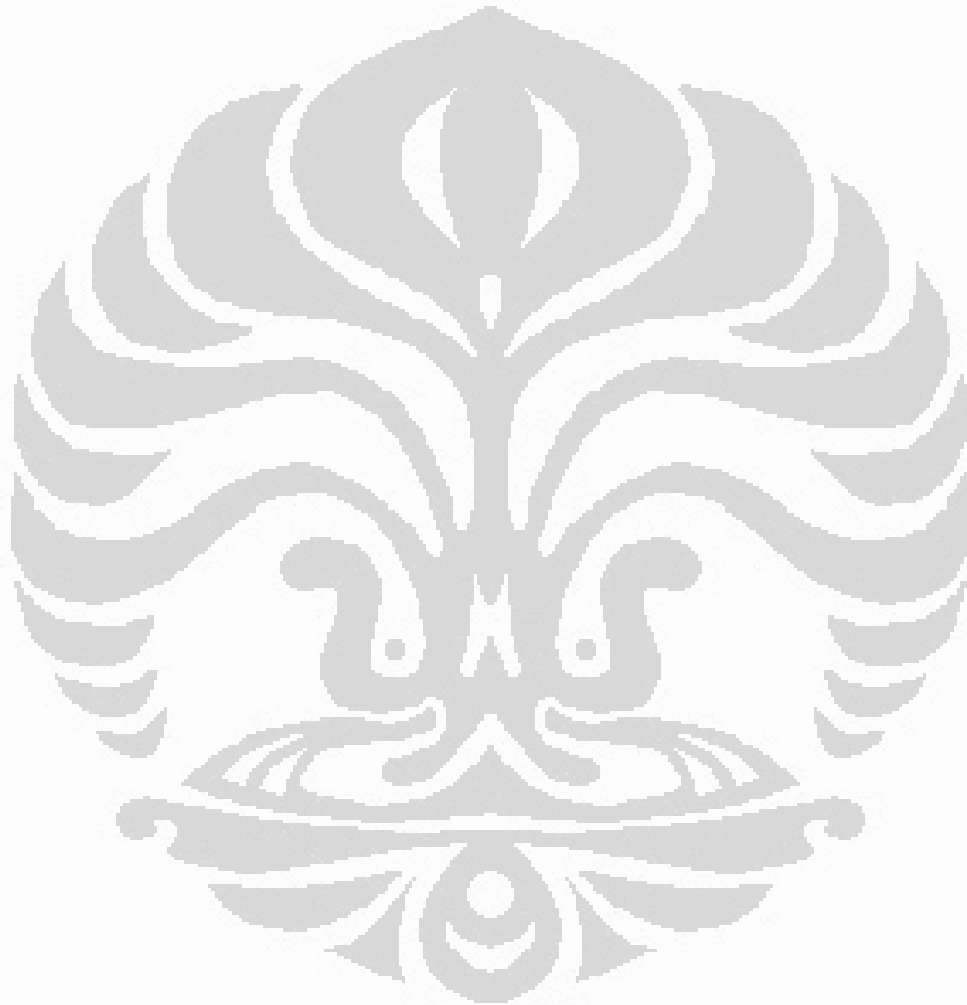
Konsep dari *community policing* dan *fear of crime* telah menjadi suatu pembahasan yang terintegrasi dan menarik diantara kalangan akademis. Penelitian mengenai *fear of crime* telah memberikan beberapa hasil yang terbukti secara empiris. Konsep tersebut menimbulkan pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap polisi memainkan peranan terhadap *fear of crime*. Masyarakat yang menilai kinerja polisi buruk, memiliki *fear of crime* yang tinggi. *Fear of crime* dapat dikurangi dengan menurunkan tingkat kejahatan riil.

Menurut Trojanowicz dan Carter dalam Dietz (1997) *fear of crime* juga dapat dikurangi dengan meningkatkan kehadiran personel polisi di tengah-tengah masyarakat. Dalam upaya mengurangi *fear of crime*, konsep tersebut selalu berhubungan dengan program *community policing*. Beberapa penelitian telah

masayarakat dalam memecahkan masalah kriminal, *fear of crime* dan ketidakteraturan.

H1 : Terdapat pengaruh kualitas pelayanan polisi terhadap rasa keamanan lingkungan

H2 : Terdapat pengaruh prosedur polisi terhadap rasa keamanan lingkungan



eksperimen menurut pola atau sifat penelitian dapat dibedakan atas penelitian kasus, penelitian kausal komparatif, penelitian korelasi, penelitian historis, dan penelitian filosofis.

Penelitian ini melakukan pengambilan data pada satu waktu tertentu untuk satu kelompok sampel, oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian model *cross-sectional*.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pelayanan dan prosedur polisi terhadap keamanan lingkungan warga, khususnya warga Rempoa pada saat terjadinya bentrok dengan Ormas FBR. Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka penelitian ini termasuk penelitian penjelasan (*explanatory research*) karena penelitian ini bermaksud menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis.

Unit analisis penelitian ini adalah warga masyarakat Rempoa – Ciputat, Jakarta Selatan. Responden penelitian ini difokuskan pada masyarakat yang ada dan turut serta dalam bentrok dengan Ormas FBR pada bulan Juli 2010. Penelitian ini akan menggambarkan persepsi warga masyarakat mengenai pelayanan dan prosedur polisi pada saat itu dalam proses pengamanan lingkungan warga.

Baik data primer maupun sekunder dikumpulkan dengan cara *cross section*, yaitu penelitian satu waktu tertentu dengan menggunakan banyak responden. Data penelitian dikumpulkan secara langsung ke lokasi penelitian.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode survei yaitu menggunakan kuesioner yang berisi butir-butir pengukur konstruk atau variabel

	dipercaya)	
9	Anda merasa tidak nyaman untuk mengadukan polisi yang melanggar peraturan atau tidak melayani dengan baik, ke Provoost Polri (propam)	Interval
10	Kehadiran polisi membuat anda merasa tidak nyaman	Interval
11	Polisi tidak datang tepat waktu ketika dibutuhkan	Interval
12	Polisi menjaga kerapihan (penampilan)	Interval
13	Cakupan wilayah patroli polisi di lingkungan anda kurang	Interval

Tabel 3.2 Indeks Prosedur Polisi

No	Indikator	Skala
1	Prosedur polisi pada saat bentrok 31 Juli sudah dilaksanakan dengan baik	Interval
2	Polisi melakukan tindakan pengamanan setelah terjadi bentrok	Interval
3	Petugas polisi mau mendengar pendapat dari warga	Interval
4	Polisi menangani massa sesuai prosedur dengan baik	Interval
5	Petugas tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan anda dengan baik	Interval
6	Petugas tidak pernah memberikan tips-tips aman lingkungan baik dalam bentuk himbauan langsung maupun spanduk	Interval
7	Polisi tidak menjalankan prosedur pengamanan apabila terjadi keributan skala kecil di lingkungan anda	Interval

penggunaan skala Likert yakni mudah untuk dibuat dan dijalankan, serta lebih mudah dipahami responden (Malhotra 2007, 267). Sebagai tambahan, data sekunder yang digunakan berasal dari *journal*, literatur internet dan lain – lain yang berkaitan dengan topic penelitian.

3.4. Populasi Penelitian

Dalam konteks studi kasus terhadap bentrok FBR dengan Warga Rempoa pada Juli 2010, populasi penelitian adalah warga atau masyarakat sekitar Rempoa.

3.5. Teknik Pengambilan Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer, dimana informasi yang dibutuhkan tidak tersedia sebelumnya. Data primer diperoleh melalui kuesioner. Kuesioner disebarikan kepada responden warga Rempoa. Kuesioner dibagikan secara pribadi dan identitas responden dirahasiakan. Teknik pemberian kuesioner secara pribadi dipilih karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain memberikan klarifikasi terhadap keraguan responden, lebih murah jika diberikan pada kelompok responden, dan anonimitas responden yang tinggi (Sekaran 2003, 251).

3.6 Metode Analisis Data

Data primer yang dikumpulkan dari instrumen kuesioner diolah dengan menggunakan SPSS (analisis statistik kuantitatif). Untuk memastikan apakah jawaban yang diberikan responden sesuai dengan kerangka pemikiran dan relevan dengan tujuan penelitian, maka jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner

Hasil pengujian validitas yang dilakukan dengan teknik korelasi *Product Moment*, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Pengujian Validitas untuk Indeks Pelayanan Polisi

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	<i>p-value</i>	Keputusan
Polisi bekerjasama dengan masyarakat			
Rempoa dalam membantu pembinaan keamanan lingkungan anda	0,678**	0,000	Valid
Polisi menjalankan jam patroli dilingkungan anda dengan baik	0,647**	0,000	Valid
Polisi bersikap sabar dan ramah dalam melayani warga	0,709**	0,000	Valid
Keberadaan polisi mengurangi tindak kejahatan/kriminalitas di lingkungan anda	0,751**	0,000	Valid
Polisi menjadi bersikap sopan dalam melayani warga	0,557**	0,000	Valid
Polisi memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang baik dalam melayani masyarakat	0,671**	0,000	Valid
Polisi merespon dan menindaklanjuti masalah dan keluhan masyarakat	0,587**	0,000	Valid
Polisi menjalankan standar etika kepolisian	0,521**	0,000	Valid

Tabel 3.5

Pengujian Validitas untuk Indeks Prosedur Polisi

Item Pernyataan	Koefisien Korelasi	<i>p-value</i>	Keputusan
Prosedur polisi pada saat bertrok 31 Juli sudah dilaksanakan dengan baik	0,464**	0,000	Valid
Polisi melakukan tindakan pengamanan setelah terjadi bentrok	0,642**	0,000	Valid
Petugas polisi mau mendengar pendapat dari warga	0,303**	0,000	Valid
Polisi menangani massa sesuai prosedur dengan baik	0,419**	0,000	Valid
Petugas tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan anda dengan baik	0,541**	0,000	Valid
Petugas tidak pernah memberikan tips-tips aman lingkungan baik dalam bentuk himbauan langsung maupun spanduk	0,737**	0,000	Valid
Polisi tidak menjalankan prosedur pengamanan apabila terjadi keributan skala kecil di lingkungan anda	0,614**	0,000	Valid

** correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Berdasarkan tabel hasil pengujian validitas di atas, diketahui bahwa Tujuh butir pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian memiliki *p-value* sebesar

Polisi tidak memberikan binaan terhadap ormas yang ada disekitar lingkungan anda	0,680**	0,000	Valid
--	---------	-------	-------

** correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Berdasarkan tabel hasil pengujian validitas di atas, diketahui bahwa Tujuh butir pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian memiliki *p-value* sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Adapun koefisien korelasi berkisar diantara 0,208 sampai dengan 0,701. Hal ini dapat diartikan bahwa masing-masing butir pernyataan tersebut adalah valid. Dengan kata lain butir – butir pernyataan tersebut dapat mewakili atau membentuk konstruk dari variabel Indeks Keamanan Lingkungan.

Uji Reliabilitas

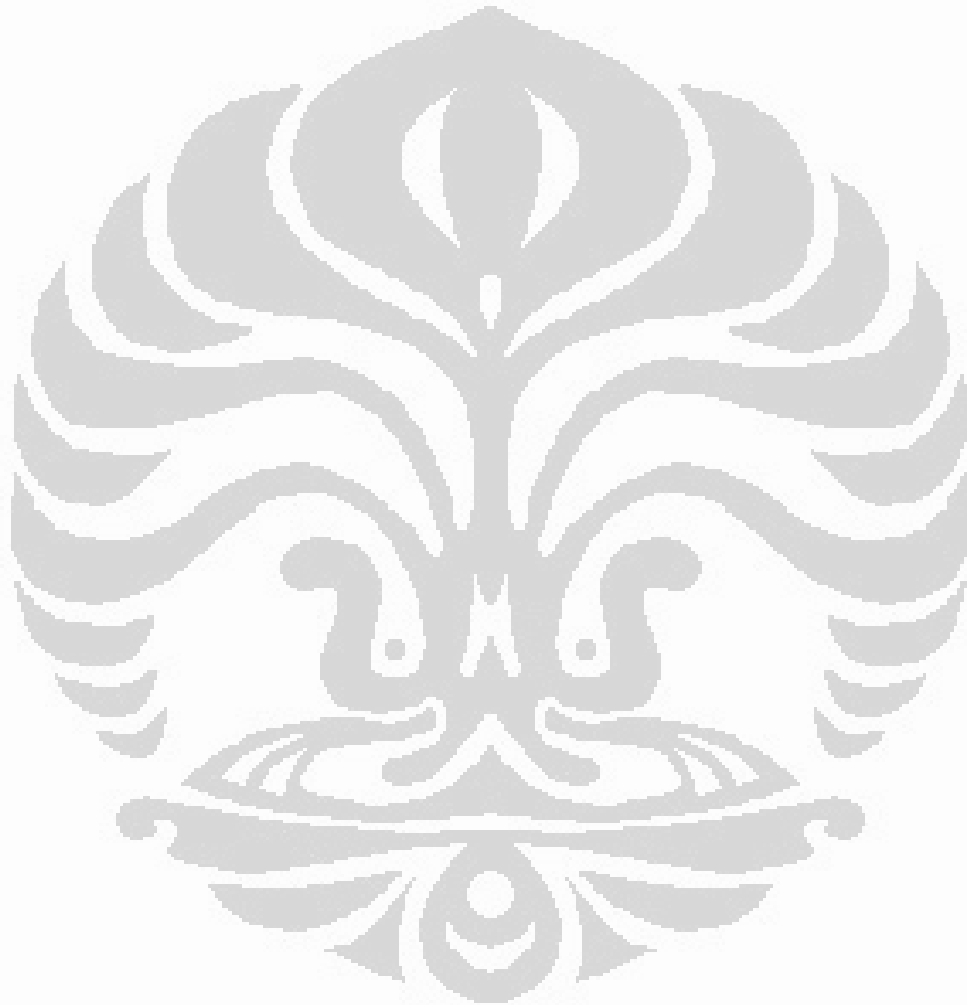
Uji reliabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulang dua kali atau lebih. Reliabilitas data pada penelitian ini diuji dengan menggunakan *Inter-item Consistency Reliability* yang melihat *Cronbach's coefficient alpha* sebagai koefisien dari reliabilitas. *Cronbach's alpha* adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan bagaimana bagian-bagian dari suatu set berkorelasi secara positif satu sama lainnya (Sekaran, 2003: 307). Suatu instrumen dianggap *reliable* jika memiliki koefisien alpha (α) sebesar 0,6 atau lebih. Dasar pengambilan keputusan menurut Sekaran (2003: 307) untuk instrumen yang *reliable* adalah:

- a. Jika *Cronbach's coefficient alpha* (α) pengujian lebih besar dari (\geq) 0,6 maka pertanyaan dalam kuesioner layak digunakan (*reliable*).

signifikansi sebesar 0,05 dan tingkat keyakinan 95%. Uji hipotesa ini dilakukan dengan cara membandingkan $p - value$ (0,05) dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika $p - value < 0,05 \rightarrow$ Ho ditolak

Jika $p - value \geq 0,05 \rightarrow$ Ho diterima



Total 58 orang 100%

Sumber: Data olahan dari kuesioner (terlampir)

Untuk tingkat jenis kelamin, responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 47 orang dari total 58 responden atau sebesar 81 % dari total seluruh responden.

Untuk responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang dari total 58 responden atau sebesar 19 % dari total seluruh responden.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakter	Frekuensi	Persentase (%)
Usia :		
18-25 tahun	24	41,4
26-35 tahun	22	37,9
36-45 tahun	7	12,1
46-55 tahun	3	5,2
> 55 tahun	2	3,4
Total	58 orang	100

Sumber: Data olahan dari kuesioner (terlampir)

Untuk tingkat usia , responden yang berusia 18-25 tahun sebanyak 24 orang dari total 58 responden atau sebesar 41,4 % dari total seluruh responden. Untuk responden yang berusia 26-35 tahun sebanyak 22 orang dari total 58 responden atau sebesar 37,9 % dari total seluruh responden. Untuk responden yang berusia

Untuk responden yang berpendidikan lainnya sebanyak 3 orang dari total 58 responden atau sebesar 5,2 % dari total seluruh responden.

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama tinggal

Karakter	Frekuensi	Persentase (%)
Lamanya :		
<1 tahun	3	5,2
1-5 tahun	3	5,2
5-10 tahun	9	15,5
10-20 tahun	17	29,3
>20 tahun	26	44,8
Total	58 orang	100

Sumber: Data olahan dari kuesioner (terlampir)

Untuk tingkat lama tinggal, responden yang tinggal selama <1 tahun sebanyak 3 orang dari total 58 responden atau sebesar 5,2 % dari total seluruh responden.

Untuk responden yang tinggal selama 1-5 tahun sebanyak 3 orang dari total 58 responden atau sebesar 5,2 % dari total seluruh responden. Untuk responden yang tinggal selama 5-10 tahun sebanyak 9 orang dari total 58 responden atau sebesar 15,5 % dari total seluruh responden. Untuk responden yang tinggal selama 10-20 tahun sebanyak 17 orang dari total 58 responden atau sebesar 29,3 % dari total seluruh responden. Untuk responden yang tinggal selama >20 tahun sebanyak 26 orang dari total 58 responden atau sebesar 44,8 % dari total seluruh responden.

Untuk tingkat ikut serta dalam bentrok, responden yang ikut serta dalam bentrok sebanyak 26 orang dari total 58 responden atau sebesar 44,8 % dari total seluruh responden. Untuk responden yang tidak ikut serta dalam bentrok sebanyak 32 orang dari total 58 responden atau sebesar 55,2 % dari total seluruh responden.

Tabel 4.7

Karakteristik Responden Berdasarkan Apakah anggota ormas

Karakter	Frekuensi	Persentase (%)
Ormas:		
Ya	2	3,4
Tidak	56	96,6
Total	58 orang	100%

Sumber: Data olahan dari kuesioner (terlampir)

Untuk tingkat anggota ormas, responden yang merupakan anggota ormas sebanyak 2 orang dari total 58 responden atau sebesar 3,4 % dari total seluruh responden.

Untuk responden yang bukan merupakan anggota ormas sebanyak 56 orang dari total 58 responden atau sebesar 96,6 % dari total seluruh responden.

4.2. Deskripsi Data

Deskripsi data berguna untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata (*mean*), *Standard deviation*, nilai minimum dan nilai maksimum. *Mean* merupakan nilai rata – rata suatu variable dari keseluruhan responden, sedangkan *Standard deviation* merupakan

Polisi bersikap sabar dan ramah dalam melayani warga	58	3.2759	.89429
Keberadaan polisi mengurangi tindak kejahatan/kriminalitas di lingkungan anda	58	3.3103	1.06305
Polisi menjada bersikap sopan dalam melayani warga	58	3.2069	.85345
Polisi memiliki tingkat pengetahuan dan keahlian yang baik dalam melayani masyarakat	58	3.1379	.75969
Polisi merespon dan menindaklanjuti masalah dan keluhan masyarakat	58	2.8966	.93075
Polisi menjalankan standar etika kepolisian	58	2.8966	.94942
Anda merasa tidak nyaman untuk mengadukan polisi yang melanggar peraturan atau tidak melayani dengan baik ke Provoost Polri	55	2.9818	1.20939
Kehadiran polisi membuat anda merasa tidak nyaman	55	2.9091	.98644
Polisi tidak datang tepat waktu ketika dibutuhkan	58	2.6379	1.15011
Polisi menjaga kerapihan	57	3.2982	1.11747
Cakupan wilayah patroli polisi di lingkungan anda kurang	58	3.1207	1.33873

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS

Polisi tidak menjalankan prosedur pengamanan apabila terjadi keributan skala kecil di lingkungan anda	58	2.8793	1.01008
---	----	--------	---------

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS

Indeks Prosedur Polisi memiliki nilai *mean* 3,0739 yang berarti rata – rata responden setuju bahwa Indeks Porsedur Polisi sudah cukup baik.

Indeks Prosedur Polisi diukur dengan menggunakan 7 item pernyataan dengan menggunakan 5 point skala likert. Dari 58 jawaban responden didapat nilai rata – rata 3,0739 yang menunjukkan bahwa responden merasa setuju terhadap Indeks Prosedur Polisi.

Tabel 4.11

Statistik Deskriptif Variabel Keamanan Lingkungan

	N	Mean	Std. Deviation
Kehadiran polisi dilingkungan anda memberikan rasa aman	58	3.4655	1.06319
Ketika anda berangkay kerja anda merasa rumah anda aman apabila tidak ada yang jaga	57	2.2281	.98230
Kehadiran polisi memberikan keamanan lingkungan yang baik pada siang hari	58	3.1034	.89226

signifikansi sebesar 0,05 dan tingkat keyakinan 95%. Uji hipotesa ini dilakukan dengan cara membandingkan *p - value* (0,05) dengan ketentuan sebagai berikut :

Jika *p - value* < 0,05 → Ho ditolak

Jika *p - value* ≥ 0,05 → Ho diterima

Berikut ini akan dijelaskan pengujian hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini :

Hipotesa 1

Hipotesa pertama menguji apakah *pelayanan polisi* mempunyai pengaruh positif terhadap *rasa keamanan lingkungan*. Bunyi hipotesa null (Ho) dan hipotesa alternatif (Ha) adalah sebagai berikut :

Ho1: Tidak terdapat pengaruh kualitas pelayanan polisi terhadap rasa keamanan lingkungan.

Ha1: Terdapat pengaruh kualitas pelayanan polisi terhadap rasa keamanan lingkungan.

Tabel 4.12

Hasil Pengujian Hipotesa 1

	Hipotesa	Beta	<i>P - value</i>	Keputusan
Ha ₁	Terdapat pengaruh kualitas pelayanan polisi terhadap rasa keamanan lingkungan	0,015	0.909	Ho ₁ diterima

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS

menunjukkan bahwa *prosedur polisi* mempengaruhi *perasaan keamanan lingkungan* dari responden.

Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa pertama (Ha1) yang ditampilkan pada tabel 4.5 dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh positif *pelayanan polisi terhadap rasa keamanan lingkungan*, artinya pelayanan polisi yang dirasakan responden tidak mempengaruhi *perasaan keamanan lingkungan*.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa kedua (Ha2) yang ditampilkan pada tabel 4.6 dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif *prosedur polisi terhadap rasa keamanan lingkungan*, artinya pelayanan polisi yang dirasakan responden dapat menciptakan *perasaan keamanan lingkungan*.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya guna memperbaiki keterbatasan – keterbatasan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan responden lainnya sebagai pembanding objek penelitian seperti *warga perumahan Kelapa Gading*.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain yang juga berpengaruh terhadap *pelayanan dan prosedur*.
3. Penelitian ini dapat memberikan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh polisi dalam meningkatkan kepuasan respondennya. Responden akan memiliki berbagai pertimbangan sebelum akhirnya memutuskan apakah akan meningkatkan pelayanan dan prosedur. Perlu diketahui oleh polisi untuk dapat menerapkan strategi yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan responden.
4. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan keahlian bagi polisi, mengenai peran variabel - variabel *pelayanan dan prosedur* terhadap *rasa keamanan lingkungan*.
5. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, relasi dan komunikasi antara polisi dengan masyarakat harus ditingkatkan. Kedua belah pihak seharusnya terlebih dahulu mengenal, baru kemudian dapat saling mengerti dan akhirnya saling memahami (*know-show-do*).

Cordner, G. W. (1988). A problem-oriented approach to community-oriented policing. In J. Greene & S. Mastrofski (Eds.), *Community Policing: Rhetoric or Reality* (pp. 135-152). New York: Praeger.

Detik. Com. diakses tanggal 1 Oktober 2010 jam pukul 08.45 WIB, dari <http://forum.detik.com/fbr-pahlawan-sosial-atau-preman-sosial-sih-t28183p2.html>

DeVere Wood. (2002). *Implementing Community Policing*.
<http://www.concentric.net/~dwoods/implecp.htm> tanggal 2 Oktober 2010 jam pukul 13.00 WIB

Dietz, Steven (1997). Evaluating Community policing : quality police service and fear of crime. *Policing: An International Journal of Police Strategy and Management*. Vol.20 No.1., pp.83-100

Djamin, Awaloedin (2007) Tantangan dan Kendala Menuju POLRI yang Profesional dan Mandiri. PTIK Press. Jakarta,

Gary Cordner. *The key elements of Community Oriented Policing.* CRCPI.
<http://dcj.state.co.us/crcpi/KeyElements.html>

Glensor, R., Carreio, M., & Peak, K. (2000). *Policing Communities*. Los Angeles, Roxbury Publishing

Goldstein, H. (1990). *Problem-oriented policing*. New York: McGraw-Hill.

Greene, J. R. (2000). Community policing in America: changing the nature, structure, and the function of the police. In J. Horney (Ed.), *Policies, processes, and the decisions of the criminal justice system* (pp. 299-370). Washington, DC: National Institute of Justice.

(pp. 113-121). Cincinnati, OH: Anderson Publishing Oriented Policing Services.

Palmiotto, M. J. (2000). *Community policing: A policing strategy for the 21st century*. Gaithersburgh, MD: Aspen Publication.

Peak, K. J. & Glensor, R. W. (2004). *Community policing and problem solving: Strategies and practices*. (4th ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Polutnik, B., Krobe, S. and Lobnikar, B. (2004), "Communication between police officers and traffic regulation violators", *Varstvoslovje: Journal of Security Theory and Praxeology*, Vol. 6 No. 4, pp. 330-7.

Rahardjo, Satjipto (2008) dalam Parsudi Suparlan. *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. YPKIK. Jakarta.

Rahardjo, Satjipto (2007). *Membangun Polisi Sipil : Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan*. Kompas. Jakarta.

Rosenbaum, D. P. (1986). *Community crime prevention: Does it work?* Beverly Hills: CA, Sage Publications.

Roth, J. A., Roehl, J., & Johnson, C. C. (2004). Trends in adaptation of community policing. In W. G. Skogan (Ed.), *Community policing: Can it work?* (pp. 3-29). Belmont, CA: Wadsworth

Sherman, D. & Eck, J. E. (2006). Policing for crime prevention. In L. W. Sherman, D. P. Farrington, B. C. Welsch & D. L. Mac Kenzie (Eds.), *Evidence-based crime prevention* (pp. 331-403). New York: Routledge.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

Walker, S. & Katz, C. M. (2005). *The police in America: An introduction (5th ed)*.
New York, Mc GrawHill.

Weisheit, R. A. (1993). Studying drugs in rural areas: Notes from the field. *Journal
of Research in Crime and Delinquency*, 30, 213-232.

White, M. D. (2007). *Current issues and controversies in policing*. Boston: A and
B Publishing.

Vinzant, J., & Crothers, L. (1994). Street-level leadership: the role of patrol
officers in community policing. *Criminal Justice Review*, 19 (2), 189-212.

Wycoff, M. A. (1988). The benefits of community policing: Evidence and
conjecture. In J. Greene & S. Mastrofski (Eds.), *Community Policing:
Rhetoric or Reality* (pp. 103-120). New York: Praeger.

Yin, R. K. (1986). A synthesis of eleven evaluations. In D. P. Rosenbaum (Ed.),
Community crime prevention: Does it work (pp. 294-308). Beverly Hills,
CA: Sage Publications.

Zhao, J. & Thurman, Q. (2004). *Funding community policing to reduce crime:
Have COPS grants made a difference?* Washington, DC: Office of
Community.

Zhao, J. (1996). *Why police organizations change: A study of community oriented
policing*. Washington, DC: Police Executive Research Forum.

Zhao, J. *Community Policing*. <http://www.unomaha.edu/~police/compol.htm>
tanggal 2 Oktober 2010 jam pukul 15.35 WIB.

Correlations

Correlations

	IPL1	IPL2	IPL3	IPL4	IPL5	IPL6	IPL7	IPL8	IPL9	IPL10	IPL11	IPL12	IPL13	Pelayanan Polisi
IPL1	1													
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL2	,540**	1												
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL3	,720**	,691**	1											
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL4	,681**	,474**	,610**	1										
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL5	,531**	,591**	,591**	,334**	1									
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL6	,522**	,333**	,614**	,633**	,361**	1								
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL7	,303*	,504**	,351**	,352**	,403**	,542**	1							
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL8	,407**	,393**	,282*	,310**	,480**	,482**	,722**	1						
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL9	,266**	,308	,045	,245*	,468	,075	,274	,360	1					
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL10	,002	,030	,048	,202	,101	,004	,105	,122	,275*	1				
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL11	,286**	,241*	,157*	,093	,423**	,102	,363**	,437**	,133	,137	1			
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL12	,234*	,136	,248*	,169	,208	,158	,133	,081	,137	,104	,267**	1		
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
IPL13	,009	,027	,072	,207	,130	,001	,018	,142	,318**	,104	,382**	,104	1	
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Pelayanan Polisi	,678**	,647**	,708**	,751**	,557**	,871**	,587**	,521**	,317**	,317**	,317**	,317**	,317**	1
Pearson Correlation														
Sig. (1-tailed)														
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58

** Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).



Correlations

Correlations

IPL1	IPL2	IPL3	IPL4	IPL5	IPL6	IPL7	IPL8	IPL9	IPL10	IPL12	IPL13	TotalIPL2
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,540** ,000 58	,720** ,000 58	,681** ,000 58	,531** ,000 58	,522** ,000 58	,303** ,010 58	,407** ,001 58	-,092 ,247 58	-,002 ,494 58	-,234** ,038 58	,009 ,473 58	,721** ,000 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,540** ,000 58	1 ,000 58	,474** ,000 58	,557** ,000 58	,333** ,005 58	,504** ,000 58	,393** ,001 58	-,066 ,306 58	-,030 ,412 58	,136 ,155 58	-,027 ,421 58	,663** ,000 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,720** ,000 58	1 ,000 58	,610** ,000 58	,591** ,000 58	,614** ,000 58	,351** ,003 58	,282** ,016 58	,045 ,368 58	-,048 ,362 58	,248** ,030 58	-,072 ,295 58	,733** ,000 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,681** ,000 58	,474** ,000 58	1 ,000 58	,334** ,005 58	,533** ,000 58	,352** ,003 58	,310** ,009 58	,245** ,032 58	,202 ,084 58	,169 ,102 58	,207 ,059 58	,778** ,000 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,531** ,000 58	,557** ,000 58	,334** ,005 58	1 ,000 58	,361** ,003 58	,403** ,001 58	,460** ,000 58	-,004 ,489 58	-,101 ,225 58	,209 ,058 58	-,130 ,166 58	,801** ,000 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,522** ,000 58	,333** ,005 58	,533** ,000 58	,361** ,003 58	1 ,000 58	,542** ,000 58	,482** ,000 58	,191 ,075 58	-,004 ,488 58	,156 ,121 58	,001 ,498 58	,677** ,000 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,303** ,010 58	,504** ,000 58	,352** ,003 58	,403** ,001 58	,352** ,003 58	1 ,000 58	,722** ,000 58	,081 ,274 58	,105 ,217 58	,133 ,159 58	-,018 ,447 58	,843** ,000 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,407** ,001 58	,393** ,001 58	,310** ,006 58	,460** ,000 58	,482** ,000 58	,722** ,000 58	1 ,000 58	,048 ,360 58	,122 ,181 58	,081 ,273 58	-,142 ,144 58	,591** ,000 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	-,092 ,247 58	-,068 ,306 58	,045 ,369 58	-,004 ,489 58	,075 ,369 58	-,004 ,489 58	-,048 ,360 58	1 ,000 58	,275* ,016 58	-,137 ,153 58	,318** ,008 58	,317** ,008 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	-,002 ,494 58	-,030 ,412 58	-,048 ,362 58	-,101 ,225 58	-,004 ,488 58	-,004 ,488 58	,122 ,181 58	,275* ,016 58	1 ,000 58	-,100 ,227 58	,308** ,009 58	,278* ,017 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,234** ,038 58	,136 ,155 58	,248** ,030 58	,209 ,058 58	,209 ,058 58	,133 ,159 58	1 ,000 58	,048 ,360 58	,122 ,181 58	-,100 ,227 58	1 ,000 58	,347** ,004 58
Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,009 ,473 58	-,027 ,421 58	,072 ,295 58	-,130 ,166 58	-,130 ,166 58	-,018 ,447 58	-,142 ,144 58	,318** ,008 58	-,104 ,218 58	,104 ,218 58	1 ,000 58	,301* ,011 58
TotalIPL2 Pearson Correlation Sig. (1-tailed) N	,721** ,000 58	,663** ,000 58	,733** ,000 58	,801** ,000 58	,677** ,000 58	,643** ,000 58	,591** ,000 58	,317** ,008 58	,278* ,017 58	,347** ,004 58	,301* ,011 58	1 ,000 58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Correlations

Correlations

	IPR1	IPR2	IPR3	IPR4	IPR5	IPR6	IPR7	Prosedur Polisi
IPR1	1							
Pearson Correlation		,436**	,035	,227*	,090	,059	-,013	,464**
Sig. (1-tailed)		,000	,398	,043	,250	,331	,463	,000
N	58	58	58	58	58	58	58	58
IPR2	,436**	1						
Pearson Correlation			,112	,172	,156	,335**	,158	,642**
Sig. (1-tailed)			,201	,098	,122	,005	,118	,000
N	58	58	58	58	58	58	58	58
IPR3	,035	,112	1					
Pearson Correlation				,319**	-,140	,014	-,043	,303*
Sig. (1-tailed)				,007	,148	,458	,374	,010
N	58	58	58	58	58	58	58	58
IPR4	,227*	,172	,319**	1				
Pearson Correlation					-,040	,112	,010	,419**
Sig. (1-tailed)					,383	,201	,472	,001
N	58	58	58	58	58	58	58	58
IPR5	,090	,156	-,140	-,040	1			
Pearson Correlation						,499**	,454**	,547**
Sig. (1-tailed)						,000	,000	,000
N	58	58	58	58	58	58	58	58
IPR6	,059	,335**	,014	,112	,499**	1		
Pearson Correlation							,667**	,737**
Sig. (1-tailed)							,000	,000
N	58	58	58	58	58	58	58	58
IPR7	-,013	,158	-,043	,010	,454**	,667**	1	
Pearson Correlation								,614**
Sig. (1-tailed)								,000
N	58	58	58	58	58	58	58	58
Prosedur Polisi	,464**	,642**	,303*	,419**	,547**	,737**	,614**	1
Pearson Correlation								
Sig. (1-tailed)								
N	58	58	58	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Correlations

		Correlations							Keamanan Lingkungan
IKL1		IKL2	IKL3	IKL4	IKL5	IKL6	IKL7		
Pearson Correlation	1								
Sig. (1-tailed)		,035	,466**	,649**	-,073	-,149	,016	,438**	
N	58	58	58	58	58	58	58	58	
Pearson Correlation		1							
Sig. (1-tailed)			-,027	-,141	-,109	,042	,177	,210	
N	58	58	58	58	58	58	58	58	
Pearson Correlation			1						
Sig. (1-tailed)				,523**	,146	,059	,059	,537**	
N	58	58	58	58	58	58	58	58	
Pearson Correlation				1					
Sig. (1-tailed)					,056	,110	,094	,560**	
N	58	58	58	58	58	58	58	58	
Pearson Correlation					1				
Sig. (1-tailed)						,807**	,547**	,676**	
N	58	58	58	58	58	58	58	58	
Pearson Correlation						1			
Sig. (1-tailed)							,590**	,701**	
N	58	58	58	58	58	58	58	58	
Pearson Correlation							1		
Sig. (1-tailed)								,680**	
N	58	58	58	58	58	58	58	58	
Pearson Correlation								1	
Sig. (1-tailed)									
N	58	58	58	58	58	58	58	58	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	58	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	58	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,774	12

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IPL1	34,1034	34,621	,618	,732
IPL2	34,3793	36,064	,555	,741
IPL3	34,1379	36,577	,661	,734
IPL4	34,1034	34,621	,702	,724
IPL5	34,2069	38,413	,509	,750
IPL6	34,2759	38,238	,608	,744
IPL7	34,5172	37,412	,549	,745
IPL8	34,5172	37,938	,486	,751
IPL9	34,3966	40,910	,144	,790
IPL10	34,5172	41,868	,138	,784
IPL12	34,1034	40,621	,189	,783
IPL13	34,2931	40,948	,104	,800

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	58	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	58	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,607	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IPR1	18,3276	11,207	,240	,596
IPR2	18,0345	9,788	,419	,533
IPR3	18,1207	12,319	,068	,645
IPR4	18,3103	11,656	,223	,598
IPR5	18,9483	10,436	,332	,566
IPR6	18,7241	8,905	,561	,474
IPR7	18,6379	9,954	,404	,539

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	58	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	58	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,621	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
IKL1	16,9138	14,922	,211	,622
IKL2	18,1552	17,011	-,022	,680
IKL3	17,2759	14,589	,352	,581
IKL4	17,1207	13,792	,359	,575
IKL5	17,5172	12,430	,468	,533
IKL6	17,6897	11,832	,485	,524
IKL7	17,6034	12,665	,493	,528

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Prosedur Polisi, Pelayanan Polisi		Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Keamanan Lingkungan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,299 ^a	,090	,057	4,12322

- a. Predictors: (Constant), Prosedur Polisi, Pelayanan Polisi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	92,052	2	46,026	2,707	,076 ^a
	Residual	935,052	55	17,001		
	Total	1027,103	57			

- a. Predictors: (Constant), Prosedur Polisi, Pelayanan Polisi
b. Dependent Variable: Keamanan Lingkungan

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12,513	3,998		3,130	,003
	Pelayanan Polisi	,010	,085	,015	,114	,909
	Prosedur Polisi	,348	,158	,295	2,203	,032

- a. Dependent Variable: Keamanan Lingkungan